

KONFLIK KEPENTINGAN	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.16, BD 2025/NO.16, 39 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik;</li> <li>b. bahwa Keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;</li> <li>b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan;</li> <li>c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Instansi Pemerintah dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan;</li> <li>d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat Pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan;</li> <li>e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan</li> <li>f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Instansi pemerintah.</li> </ul> </li> <li>- Dalam Peraturan Bupati Ini Memuat Konflik Kepentingan, Pengelolaan Konflik Kepentingan Instansi Pemerintah</li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2025;</li> <li>- Berlakunya peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Nganjuk nomor 5 Tahun 2022;</li> <li>- Lampiran 20 halaman.</li> </ul>